



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Kamis, 8 Mei 2025



RINGKASAN BERITA HARI IN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDOARJO



KOMISI B DUKUNG PEMKAB KURDA BUNGA RINGAN



H. Bambang Pujianto, S.Sos., M.Si
Ketua Komisi B DPRD Kab. Sidoarjo

Sidoarjo - Pojok Kiri, Komisi B DPRD Sidoarjo mendukung penuh program Kurda Pemkab Sidoarjo untuk membuka akses permodalan yang mudah, bunga ringan dan angsuran murah bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Bagi yang tertarik dapat datang langsung ke BPR Delta Artha Sidoarjo untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat Daerah/Kurda. Suku bunga yang ditawarkan hanya sebesar 2% per tahun dengan pinjaman maksimal Rp. 50 juta, Ucap H. Bambang Pujianto, S.Sos, M.Si ketua Komisi B saat dikonfirmasi wartawan via WhatsApp, Rabu 7/5/25.Dia menambahkan program Kurda melalui bank BPR Delta Artha Sidoarjo itu sudah diluncurkan Bupati Sidoarjo H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa, beberapa waktu lalu, Katanya.Legislator dari Gerindra ini mengajak para pelaku UMKM Sidoarjo memanfaatkan program Kurda bunga ringan ini sehingga mereka bisa membesarkan usahanya dan jika usaha mereka berkembang akan bisa menopang ekonomi mereka sekaligus bisa andil ikut menaikkan PAD dari sektor UMKM, Ucapnya. Sedangkan legislator kawakan H. M Agil Effendi SE.MM saat dikonfirmasi wartawan terkait program Kurda bunga ringan, ia mengatakan pada wartawan via WhatsApp, Rabu, 7/5/25, Sidoarjo merupakan kota UMKM olehkarena itu mari para pelaku UMKM menggunakan Kurda bunga ringan ini agar geliat pertumbuhan ekonomi UMKM di Sidoarjo semakin tumbuh karena sehingga mereka bisa sejahtera dengan usahanya dan juga akan mengawangi dampak

pengangguran. Kata legislator Demokrat pada wartawan.Begitu pula legislator muda Atoq Ashari yang familiar serta perwakannya yang tidak kelihatan kalau dia anggota DPRD bagi masyarakat yang belum mengetahui nya,karena kesederhanaannya.Dia sangat responsif sekali dengan program Kurda bunga ringan, mengingat kredit ini sangat meringankan masyarakat dan mereka bisa buka usaha UMKM, Kata Politisi asal Wonoayu ini pada wartawan, Rabu, 7/5/25.Sedangkan Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan launching Kurda 2025 menjadi langkah besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan. Dikatakannya Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kota UMKM. Lebih dari 60% struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari pasar tradisional hingga sentra industri rumah sampai dari kuliner hingga kerajinan merupakan nadi utama perekonomian rakyat, Tandasnya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan peraturan bupati nomor 8 tahun 2025 merubah Perbup nomor 52 tahun 2023. Dalam regulasi baru tersebut suku bunga Kurda diturunkan menjadi 2% per tahun. Subsidi bunga kredit itu untuk maksimal pinjaman Rp. 50 juta. "Ini bentuk konkret keberpihakan anggaran kita terhadap ekonomi rakyat. Selain itu, anggaran subsidi bunga Kurda kami tingkatkan dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya menjadi Rp 5 Miliar. Anggaran ini adalah investasi sosial untuk membuka akses permodalan yang adil, murah, dan aman bagi pelaku usaha kecil,"ujarnya.Disampaikannya juga bahwa hingga awal April 2025 ini, BPR Delta Artha telah menyalurkan lebih dari 2.035 pembiayaan Kurda dengan nilai total lebih dari Rp. 76 miliar. Sementara itu Direktur Utama PT. BPR Delta Artha Persero Sofia Nurkrisnaji Atmaja mengatakan program Kurda merupakan wujud nyata Pemkab Sidoarjo bersama BPR Delta Artha dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Tahun 2025 ini dirinya menargetkan minimal 3.500 UMKM yang memperoleh fasilitas program Kurda. Selain pelaku usaha mikro dan kecil, Kurda juga ditujukan kepada pelaku usaha produktif bidang pertanian dan perikanan. "Target kami BPR Delta Artha ini dapat dapat memberikan fasilitas Kurda untuk membantu desa-desa ada jejepudi UMKM atau lebih



H. Mohamad Agil Effendi, S.E., M.M.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo

yang mendapatkan Kurda,"ucapnya.Sofia juga mengatakan penerima Kurda tahun ini akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Penerima Kurda akan diikutkan dalam kepesertaan program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan. Jurrannya akan dibayar langsung oleh BPR Delta Artha, Katanya (Khol/ ADV).



Bupati Tunggu Manajemen

KOTA-Polemik penyewaan Stadion Gelora Delta Sidoarjo (GDS) masih belum menemukan titik terang. Kurangnya komunikasi antara Pemkab Sidoarjo dan manajemen Deltras membuat permasalahan ini terus menggantung.

Usai bertemu dengan kelompok supporter Deltamania, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menaikkan tarif sewa stadion. Ia menjelaskan, tarif sewa yang berlaku saat ini merupakan ketetapan dari bupati sebelumnya dan baru akan diberlakukan pada 2025. "Hingga saat ini belum ada komuni-



MENGGANTUNG: Foto bersama antara Bupati Sidoarjo Subandi dan kelompok supporter Deltras Sidoarjo, Deltamania

Fas dari manajemen Deltras kepada saya. Padahal sebagai kepala daerah, saya berkomitmen agar Deltras tetap bermain di Kota Delta," ujarnya.

Subandi juga menyampaikan bahwa dirinya merupakan pencinta sepak bola dan ingin Deltras terus eksis. Namun, ia menegaskan bahwa

Pemkab masih menunggu inisiatif dari pihak manajemen Deltras untuk datang dan membicarakan persoalan tersebut secara langsung.

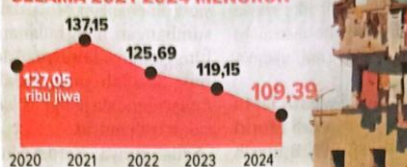
Ia menambahkan, Stadion GDS kini telah berstandar internasional dan telah diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. "Presiden sebelumnya sempat meninjau stadion lain, namun akhirnya memilih GDS untuk peresmian," ungkapnya.

Menanggapi keluhan terkait tingginya tarif sewa, Subandi menawarkan solusi berupa sistem penjualan tiket yang dibagi per wilayah. Selain itu, organisasi perangkat daerah (OPD) juga akan dilibatkan untuk membantu meringankan beban biaya sewa stadion.

Kesibukannya sebagai bupati membuatnya tidak bisa terus menunggu. Oleh karena itu, ia berharap agar manajemen Deltras segera datang ke Pendapa. (sai/vga)

SIDOARJO DALAM ANGKA

JUMLAH PENDUDUK MISKIN SELAMA 2021-2024 MENURUN



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

GRAFIS: HERLAMBAHO/JIWA POS

JUMLAH penduduk miskin di Sidoarjo pada 2020 tercatat sebanyak 127,05 ribu jiwa, kemudian meningkat menjadi 137,15 ribu jiwa pada 2021. Namun, sejak 2022 hingga 2024, jumlahnya terus menurun hingga berjumlah 109,39 ribu jiwa pada 2024. (eza/uzi)

DELTASIANA



TERJEBAK: Tim Rescue Damkar Pos Krian mengevakuasi warga Desa Suko, Sukodono, yang terkunci di dalam warungnya sendiri, Selasa (6/5).

Warga Sukodono Terkunci di Warung Sendiri

TIM Rescue Damkar Pos Krian berhasil mengevakuasi Figo, pria 26 tahun yang terjebak di dalam warung kopinya sendiri di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, pada Selasa (6/5) dini hari. Dia terjebak karena kunci gerbang rolling door-nya rusak. Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu mengatakan, laporan masuk sekitar pukul 01.23. "Menyadari tak ada jalan keluar, korban segera menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan evakuasi," katanya.

Tim Damkar yang menerima laporan langsung meluncur ke lokasi dan berhasil mengeluarkan Figo. (eza/uzi)



LOETFI/DUTA

Bupati Subandi menemui kelompok suporter Deltamania bahas tarif sewa Stadion Gelora Delta, Selasa (6/5/25).

Subandi Ajak Deltras Tetap Bermaskas di Sidoarjo

SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar audiensi dengan kelompok suporter Deltamania untuk membahas polemik tarif sewa Stadion Gelora Delta. Dalam pertemuan itu, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmennya mendukung Deltras FC dan para suporternya.

Bupati Subandi menaruh perhatian besar terhadap masa depan klub berjuduk The Lobster tersebut. Ia berharap Deltras tetap bermaskas di Kota Delta dan menyampaikan bahwa Pemkab terbuka untuk berdialog dengan manajemen klub guna mencari solusi terbaik.

Kita tunggu manajemen Del-

tras datang ke Pendopo. Kalau mereka hadir, kita bisa duduk bersama dan membicarakan semuanya,” ujar Subandi usai audiensi di Pendopo Delta Wibawa, Selasa sore, (6/5/25).

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pertemuan resmi antara pihaknya dan manajemen Deltras. “Pemkab terbuka. Tidak perlu undangan formal, datang saja langsung. Lucu kalau Bupati yang harus undang tamu,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Deltamania, Syaiful Bakirok, merasa lega bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati. Ia menilai

audiensi ini sebagai langkah awal positif untuk membuka komunikasi antara Pemkab dan manajemen Deltras.

“Kami sudah sampaikan semua uneg-uneg kami. Sekarang tinggal manajemen Deltras yang perlu menindaklanjuti,” ungkapnya.

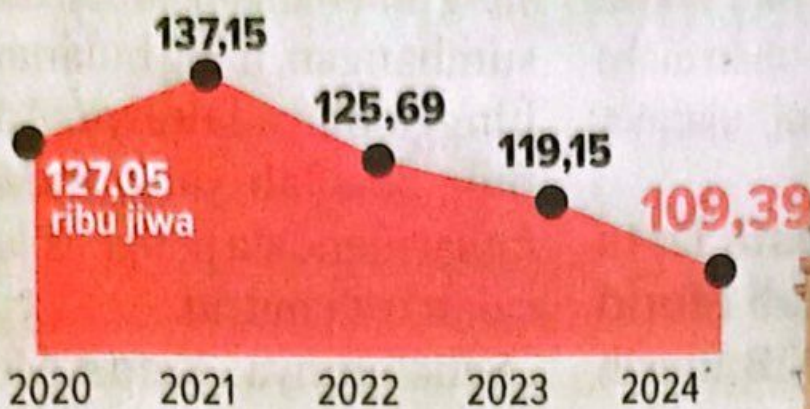
Syaiful pun berjanji akan segera mendorong manajemen Deltras menemui Bupati. Menurutnya, keterbukaan yang ditunjukkan Subandi merupakan sinyal positif yang harus segera direspons.

“Kami akan segera konsultasi dengan CEO Deltras agar pertemuan ini bisa segera terlaksana,” pungkasnya. • Loe

DUTA

SIDOARJO

JUMLAH PENDUDUK MISKIN SELAMA 2021-2024 MENURUN



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

GRAFIS: HERLAMBAH/JAWA POS

JUMLAH penduduk miskin di Sidoarjo pada 2020 tercatat sebanyak 127,05 ribu jiwa, kemudian meningkat menjadi 137,15 ribu jiwa pada 2021. Namun, sejak 2022 hingga 2024, jumlahnya terus menurun hingga berjumlah 109,39 ribu jiwa pada 2024. (eza/uzi)

DELTA SIANA



AHMAD REZA/JAWA POS

TERJEBAK: Tim Rescue Damkar Pos Krian mengevakuasi warga Desa Suko, Sukodono, yang terkunci di dalam warungnya sendiri, Selasa (6/5).

Warga Sukodono Terkunci di Warung Sendiri

TIM Rescue Damkar Pos Krian berhasil mengevakuasi Figo, pria 26 tahun yang terjebak di dalam warung kopinya sendiri di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, pada Selasa (6/5) dini hari. Dia terjebak karena kunci gerbang *rolling door*-nya rusak.

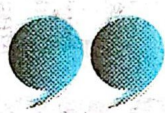
Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu mengatakan, laporan masuk sekitar pukul 01.23.

"Menyadari tak ada jalan keluar, korban segera menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan evakuasi," katanya.

Tim Damkar yang menerima laporan langsung meluncur ke lokasi dan berhasil mengeluarkan Figo. (eza/uzi)

Jawa Pos

Satlantas Rutin Gelar Layanan SIM Keliling



Layanan SIM
Keliling selalu

ditunggu warga. Terbukti, antusias masyarakat luar biasa hari ini (kemarin, Red). Ada ratusan orang yang datang. Lebih memudahkan bagi yang tinggal di sekitar karena tidak harus pergi jauh mengurus perpanjangan."



AKP SUGENG SULISTIYONO

Kapolsek Balongbendo bicara terkait layanan SIM Keliling di mapolsek kemarin (7/5). Satlantas mengadakan layanan itu rutin ke berbagai kawasan.

EDI SUDRAJAT

Jawa Pos



Embung Ketapang Akan Dijadikan Wisata Edukasi

SIDOARJO - Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo akan mengembangkan Embung Ketapang dan kawasan sekitar lumpur Sidoarjo menjadi destinasi wisata baru yang edukatif.

Laksmi menjelaskan, pihaknya telah melakukan tinjauan lapangan bersama DPRD Sidoarjo dan Pusat Pengendali Lumpur Sidoarjo (PPLS). "Kami baru melaksanakan peninjauan di Embung Ketapang yang rencananya akan dijadikan wisata edukasi," katanya kemarin (7/5).

Langkah itu menjadi bagian dari percepatan kerja sama pemanfaatan kawasan sekitar tanggul lumpur terbatas dan Embung Ketapang. "Kali retensi Ketapang akan disiapkan menjadi kawasan wisata air yang terkelola dan terintegrasi," ujarnya.

Yudhi Iriyanto menambahkan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan PPLS. Ia menyebutkan, dalam rencana pengembangan, di kawasan Porong akan dibangun Geopark Lumpur, termasuk Museum Geopark Lumpur. Sebelumnya Pemkab Sidoarjo sempat melakukan

peninjauan pada 2021 dan memproyeksikan bekas SDN Mendi Porong menjadi museum. "Nanti ada semacam museum, yang jadi galeri edukasi bagi anak-anak muda. Kita ingin kawasan ini tidak hanya menjadi tempat wisata, tapi juga tempat belajar," ungkapnya. (eza/uzi)

Jawa Pos



AHMAD REZA/JAWA POS

AKSES DIBATASI: Kondisi Jembatan Jalan Pasar Jetis, Kelurahan Lemah Putro, retak di beberapa sisi dan beton pembatas jembatan keropos kemarin (7/5).

Retak, Jembatan Jalan Pasar Jetis Tidak Bisa Dilewati Mobil

SIDOARJO - Sepekan lebih, Jalan Pasar Jetis, Kelurahan Lemah Putro, penghubung Jalan Diponegoro menuju Jalan Gajah Mada ditutup untuk mobil. Kondisi itu karena jembatan retak.

Lukman, warga sekitar, mengatakan bahwa jembatan ditutup agar beban jembatan yang melintas di Sungai Sidokare itu berkurang. "Pemo-

tor masih bisa lewat, ini jalur alternatif yang cukup ramai kalau untuk ke Jalan Gajah Mada dari Jalan Diponegoro," ujarnya kemarin (7/5).

Dia menyebut ada keretakan di sisi timur jembatan. Pagar pembatas beton di kanan dan kiri juga mengalami kerusakan. "Pembatas beton keropos," katanya.

Jembatan Jalan Pasar Jetis yang mengalami kerusakan akan dilakukan identifikasi

oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA). "Beberapa hari ini akan diidentifikasi oleh tim kami. Apabila hasilnya nanti menunjukkan kerusakan ringan, akan dilakukan pemeliharaan tahun ini," ujarnya.

Namun, jika hasilnya menunjukkan kerusakan berat, pihaknya akan mengusulkan pembangunan ulang jembatan tersebut pada 2026. (eza/uzi)

Jawa Pos

Polisi Tutup U-Turn Geluran dengan Beton

SIDOARJO - Satlantas Polresta Sidoarjo kembali menerapkan rekayasa lalu lintas di wilayah Taman. Upaya terbarunya dengan menutup *U-turn* di Jalan Raya Geluran menggunakan beton.

Kasatlantas Polresta Sidoarjo AKP Jodi Indrawan menyatakan, penutupan *U-turn* itu untuk mengurangi kemacetan. Dari analisisnya, titik itu dinilai menjadi salah satu pemicu. "Dalam rangka melancarkan arus," ujarnya kemarin (7/5).

Jalan Raya Geluran, lanjutnya, tergolong jalur padat. Volume kendaraan yang

melintas cukup tinggi. Jadi, diperlukan *treatment* untuk mencegah kemacetan.

Jodi menambahkan, rekayasa mulai diterapkan Selasa (6/5) petang. Menurut dia, penerapannya tidak lagi sementara. Material yang digunakan untuk penutup pun dari beton. "Dibuat permanen," katanya.

Kebijakan itu menuai pro dan kontra. Ferdian, salah seorang warga, menyebut penutupan itu membuatnya harus menempuh rute lebih panjang. "Semoga dikaji ya," katanya. (edi/uzi)



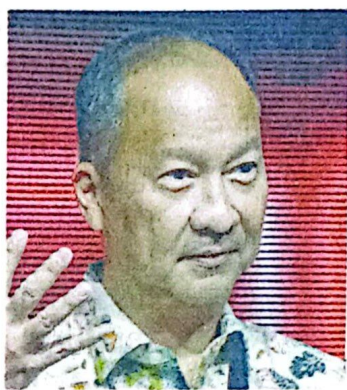
EDI SUDRAJAT/ JAWA POS

REKAYASA LALU LINTAS: U-turn di Jalan Raya Geluran ditutup dengan beton untuk mengurangi kemacetan kemarin (7/5).

Pemerintah Revisi Aturan TKDN Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden) baru tentang PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) Pemerintah, yakni Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah. Regulasi baru itu mengatur tentang kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk membeli produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan produk dalam negeri (PDN).

Dalam perpres tersebut, dijabarkan urutan prioritas belanja pemerintah atas produk ber-TKDN dan PDN. Pertama, jika ada produk yang penjumlahan skor TKDN dan BMP (Bobot Man-



SALMAN TOYIBI/JAWA POS
Agus Gumiwang

faat Perusahaan)-nya lebih dari 40 persen, maka yang bisa dibeli pemerintah melalui PBJ adalah produk yang ber-TKDN di atas 25 persen.

Kedua, jika tidak ada produk yang penjumlahan skor TKDN dan BMP-nya di atas 40 persen, tapi ada produk yang memiliki skor TKDN di atas 25 persen, maka produk yang memiliki skor TKDN di atas 25 persen bisa

dibeli pemerintah.

Ketiga, jika tidak ada produk yang ber-TKDN di atas 25 persen, maka pemerintah bisa membeli produk yang ber-TKDN lebih rendah dari 25 persen. Terakhir, jika tidak ada produk yang bersertifikat TKDN, maka pemerintah bisa membeli PDN yang terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

"Kami dan perusahaan industri sangat mengapresiasi. Regulasi ini menjadi angin segar bagi industri ditengah tekanan demand domestik saat ini, terutama bagi industri yang menghasilkan produk yang dibeli oleh pemerintah dan BUMN serta BUMD," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta kemarin (7/5). **(agf/dio)**

Jawa Pos

BUPATI SUBANDI TEGASKAN DELTRAS HARUS TETAP BERMARKAS DI SIDOARJO

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar audiensi dengan kelompok suporter Deltamania untuk membahas polemik tarif sewa Stadion Gelora Delta. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Deltras FC dan para suporternya.

Bupati Sidoarjo menaruh perhatian besar terhadap masa depan klub berjuluk "The Lobster" itu. Ia berharap Deltras tetap bermarkas di Kota Delta dan menyampaikan bahwa Pemkab terbuka untuk berdialog dengan manajemen klub guna mencari solusi terbaik.

"Kita tunggu manajemen Deltras datang ke Pendopo. Kalau mereka hadir, kita bisa duduk bersama dan membicarakan semuanya," ujar Subandi usai pertemuan di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (6/5).

Subandi juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pertemuan antara pihaknya dengan manajemen Deltras.



Ia menegaskan tidak perlu menunggu undangan resmi dari pemerintah daerah.

"Pemkab terbuka. Tidak perlu undangan formal, datang saja langsung. Lucu kalau Bupati yang harus undang tamu," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Deltamania, Syaiful Bakirok, merasa lega karena bisa menyampaikan langsung aspirasi kepada Bupati. Ia menilai audiensi ini sebagai langkah awal yang positif untuk membuka komunikasi antara Pemkab dan manajemen Deltras.

"Kami sudah sampaikan semua uneg-uneg kami. Sekarang tinggal manajemen Deltras yang perlu tindaklanjuti," ungkapnya.

Syaiful juga berjanji akan segera mendorong manajemen Deltras untuk menemui Bupati Sidoarjo. Menurutnya, keterbukaan yang ditunjukkan oleh Subandi merupakan sinyal positif yang harus segera direspon.

"Kami akan segera konsultasi dengan CEO Deltras agar pertemuan ini bisa segera terlaksana," pungkasnya. (Khol/ADV)



Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



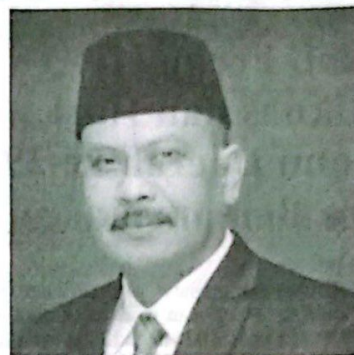
KOMISI B DUKUNG PEMKAB KURDA BUNGA RINGAN



H. Bambang Pujianto, S.Sos., M.Si
Ketua Komisi B DPRD Kab. Sidoarjo

Sidoarjo - Pojok Kiri, Komisi B DPRD Sidoarjo mendukung penuh program Kurda Pemkab Sidoarjo untuk membuka akses permodalan yang mudah, bunga ringan dan angsuran murah bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Bagi yang tertarik dapat datang langsung ke BPR Delta Artha Sidoarjo untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat Daerah/Kurda. Suku bunga yang ditawarkan hanya sebesar 2% per tahun dengan pinjaman maksimal Rp. 50 juta, Ucap H. Bambang Pujianto, S.Sos., M.Si ketua Komisi B saat dikonfirmasi wartawan via WhatsApp, Rabu, 7/5/25. Dia menambahkan program Kurda melalui bank BPR Delta Artha Sidoarjo itu sudah diluncurkan Bupati Sidoarjo H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa, beberapa waktu lalu, Katanya. Legislator dari Gerindra ini mengajak para pelaku UMKM Sidoarjo memanfaatkan program Kurda bunga ringan ini sehingga mereka bisa membesarkan usahanya dan jika usaha mereka berkembang akan bisa menopang ekonomi mereka sekaligus bisa andil ikut menaikkan PAD dari sektor UMKM, Ucapnya. Sedangkan legislator kawakan H. M Agil Effendi S.E., M.M saat dikonfirmasi wartawan terkait program Kurda bunga ringan, ia mengatakan pada wartawan via WhatsApp, Rabu, 7/5/25, Sidoarjo merupakan kota UMKM oleh karenanya mari para pelaku UMKM menggunakan Kurda bunga ringan ini agar geliat pertumbuhan ekonomi UMKM di Sidoarjo semakin tumbuh dan juga akan mengurangi dampak

pengangguran, Kata legislator Demokrat pada wartawan. Begitu pula legislator muda Atok Ashari yang familiar serta perawakannya yang tidak kelihatan kalau dia anggota DPRD bagi masyarakat yang belum mengetahuinya, karena kesederhanaannya. Dia sangat responsif sekali dengan program Kurda bunga ringan, mengingat kredit ini sangat meringankan masyarakat dan mereka bisa buka usaha UMKM, Kata Politisi asal Wonoayu ini pada wartawan, Rabu, 7/5/25. Sedangkan Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan launching Kurda 2025 menjadi langkah besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan. Dikatakannya Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kota UMKM. Lebih dari 60% struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari pasar tradisional hingga sentra industri rumah tangga sampai dari kuliner hingga kerajinan merupakan nadi utama perekonomian rakyat, Tandanya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan peraturan bupati nomor 8 tahun 2025 merubah Perbup nomor 52 tahun 2023. Dalam regulasi baru tersebut suku bunga Kurda diturunkan menjadi 2% per tahun. Subsidi bunga kredit itu untuk maksimal pinjaman Rp. 50 juta. "Ini bentuk konkret keberpihakan anggaran kita terhadap ekonomi rakyat. Selain itu, anggaran subsidi bunga Kurda kami tingkatkan dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya menjadi Rp 5 Miliar. Anggaran ini adalah investasi sosial untuk membuka akses permodalan yang adil, murah, dan aman bagi pelaku usaha kecil,"ujarnya. Disampaikannya juga bahwa hingga awal April 2025 ini, BPR Delta Artha telah menyalurkan lebih dari 2.035 pembiayaan Kurda dengan nilai total lebih dari Rp. 76 miliar. Sementara itu Direktur Utama PT. BPR Delta Artha Persero Sofia Nurkrisnaji Atmaja mengatakan program Kurda merupakan wujud nyata Pemkab Sidoarjo bersama BPR Delta Artha dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Tahun 2025 ini dirinya menargetkan minimal 3.500 UMKM yang memperoleh fasilitas program Kurda. Selain pelaku usaha mikro dan kecil, Kurda juga ditujukan kepada pelaku usaha produktif bidang pertanian dan perikanan. "Target kami BPR Delta Artha ini dapat dapat memberikan fasilitas Kurda minimal satu desa dan setiap UMKM atau lebih



H. Mohamad Agil Effendi, S.E., M.M.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo

yang mendapatkan Kurda,"ucapnya. Sofia juga mengatakan penerima Kurda tahun ini akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Penerima Kurda akan diikutkan dalam kepesertaan program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya akan dibayar langsung oleh BPR Delta Artha, Katanya (Khol/ADV).



POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



Polisi memberi motivasi peternak bebek petelur.

Pengecekan Program Ketahanan Pangan di Plumbon

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Bhabinkamtibmas Desa Plumbon Polsek Porong Polresta Sidoarjo, Aiptu Abdi Teguh Eko Wahono, melaksanakan pengecekan terhadap pelaksanaan Program 1 Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Kegiatan ini berlangsung Rabu pagi 7 Mei 2025 di lahan pekarangan milik Suwanto, warga RT 03 RW 01 desa setempat.

Program P2B yang digagas untuk memperkuat ketahanan pangan Polresta Sidoarjo Polda Jatim kali ini diterapkan dengan metode pengelolaan peternakan bebek petelur. Dalam kunjungannya, Aiptu Abdi Teguh Eko Wahono meninjau langsung sarana dan prasarana penunjang kegiatan swasembada pangan, serta memberikan pendampingan kepada warga terkait program Asta Cita Presiden RI.

Sebanyak 300 ekor bebek petelur yang dikelola oleh Suwanto menjadi fokus pengecekan. Diharapkan, program ini tidak hanya menjadi sumber pangan bergizi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (md/rus)



Scanned with CamScanner



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

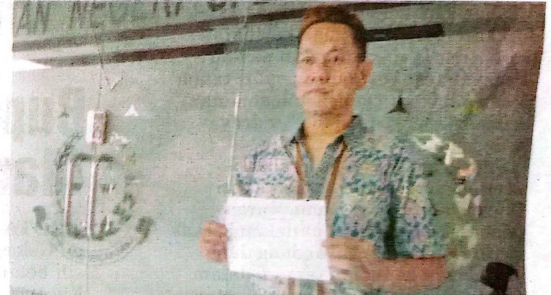
Pengelolaan TKD Trosobo untuk Wahana Wisata Dilaporkan ke Kejari

KOTA-Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Trosobo, Kecamatan Taman, terus mencuat. Sejumlah warga mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo pada Rabu (7/5). Tujuannya untuk

melaporkan Pemerintah Desa (Pendes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pembiaran praktik korupsi. Berdasarkan pantauan Radar Sidoarjo, warga tiba di Kejari sekitar pukul

14.00. Mereka menilai, pengelolaan TKD yang dialihfungsikan menjadi wahana wisata oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan tanpa transparansi dan tidak memberikan kontribusi

● Ke Halaman 10



LAPORAN: Pelapor Tantri Sanjaya saat di Kejari Sidoarjo, Rabu (7/5).



Pengelolaan TKD Trosobo...

signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Salah satu pelapor, Tantri Sanjaya, menjelaskan bahwa dirinya pernah

mengajukan penawaran untuk menyewa lahan tersebut senilai Rp 100 juta per tahun selama tiga tahun. Namun, tawaran tersebut ditolak tanpa alasan yang jelas oleh pihak Pendes dan BPD.

"Padahal saya siap menyewa lahan dengan nilai total Rp 300 juta. Tapi ditolak begitu saja. Sementara, dari informasi yang saya terima, selama dua tahun beroperasi, BUMDes hanya menyeter Rp 2 juta ke PADes. Ini sangat janggal," ujarnya.

Tantri mencurigai adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja menutupi praktik pengelolaan tersebut demi kepentingan pribadi. Ia berharap Kejari Sidoarjo dapat mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas pihak yang terbukti bersalah.

Saya serahkan sepenuhnya ke Kejari. Kami warga hanya ingin pengelolaan desa dilakukan secara terbuka

dan benar. Niat saya murni untuk membantu pembangunan desa dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga," tegasnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa pengelolaan lahan tidak diberikan kepada investor yang sudah jelas komitmennya untuk membangun desa. "Kalau BUMDes tidak mampu memberikan kontribusi nyata, mengapa tidak diserahkan kepada pihak yang bisa?" tambahnya.

Dalam laporannya, warga menilai terdapat pelanggaran terhadap Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo, John Franky Yanafia Ariandi, saat dikonfirmasi belum memberikan pernyataan resmi.

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Trosobo, Nining Sulistyowati, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi terkait masuknya tawaran investasi.

"Kami belum bisa memberikan keputusan akhir. Saat ini masih dibicarakan lebih lanjut dengan BUMDes," tandasnya. (dik/vga)

CS Scanned with CamScanner





PARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO
Periode 2024-2029

Rapat Paripurna Penyerahan Rekomendasi LKPJ Bupati Sidoarjo TA 2024, DPRD Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan Lewat Pemanfaatan Silpa

KOTA-DPRD Kabupaten Sidoarjo mengapresiasi realisasi kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2024 yang menunjukkan capaian positif. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo tahun anggaran 2024.

Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Zuhul Yussar menyampaikan, pendapatan daerah pada 2024 melampaui target yang telah ditetapkan. Tercatat, realisasinya mencapai 104,9 persen atau melebihi target sebesar Rp 247,3 miliar lebih.

Sementara itu, realisasi belanja daerah berada di angka 93 persen. Dari total anggaran, terdapat belanja yang belum teresap senilai Rp 397,5 miliar lebih. Padahal dalam perubahan APBD 2024 semula diproyeksikan terjadi defisit sebesar Rp 562,9 miliar. "Setelah perubahan semula diproyeksikan defisit, maka realisasinya justru menghasilkan surplus 82M," bebernya, Selasa, (6/5).

Selain surplus, pemerintah daerah juga mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) unaudit dengan angka cukup tinggi. Nilainya mencapai Rp 642,775,650,518 atau lebih dari Rp 642,7 miliar.

"Secara nominal meningkat nilainya dibanding tahun sebelumnya, proporsi Silpa tahun 2024 10,9 persen dari total dana yang tersedia," ujarnya.

Dalam dokumen LKPJ, Silpa tersebut juga dihitung terhadap realisasi dana secara keseluruhan. Grafik pertumbuhan silpa menunjukkan tren positif namun tetap perlu diawasi pemanfaatannya.

Zuhul menilai, pengelolaan Silpa harus diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis pembangunan daerah. Terlebih, beberapa program prioritas masih perlu penguatan dari sisi pembiayaan.

"Rekomendasi DPRD berdasarkan laporan realisasi anggaran HPPD 2024 sesuai surat edaran Mendagri nomor 900.11/640/SJ tanggal 11 Februari 2025, memastikan beberapa tema dan isu pembangunan yang menjadi prioritas," jelasnya.

"Seperti penguatan sumber makanan bergizi dan penanganan stunting harus jadi perhatian utama, penanganan stunting, peningkatan pertumbuhan perekonomian, dukungan swasembada pangan dan pengembangan industri kerajinan," imbuhnya.

● Ke Halaman 10

PENYAMPAIAN: Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Zuhul Yussar dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo tahun anggaran 2024.

SERIOUS: Suasana rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo tahun anggaran 2024.

layout: had

Rapat Paripurna...

Dari sisi pendapatan, DPRD juga mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah. Salah satunya melalui upaya pemerintah daerah dalam mengejar insentif fiskal tambahan dari pemerintah pusat.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, yaitu tahun 2025. DPRD menekankan bahwa semua langkah itu perlu disertai pengawasan dan transparansi.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih turut menanggapi capaian tersebut dengan optimistis namun tetap waspada. Dia menyebut, penggunaan silpa ke depan harus diarahkan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah daerah.

"Masih banyak PR yang perlu dituntaskan, dan silpa bisa dimanfaatkan untuk itu," ucapnya saat ditemui Radar Sidoarjo.

Menurutnya, berbagai program yang sempat tertunda bisa dipacu lewat perge-

seran anggaran dan pemanfaatan silpa. Baginya, tahun 2025 menjadi momentum penting untuk menuntaskan target pembangunan yang belum tercapai.

"DPRD siap mengawal dan memberi dukungan penuh sepanjang prosesnya berpihak pada rakyat," terangnya.

Penggunaan anggaran daerah harus tetap berpijak pada asas efisiensi dan efektivitas. Maka dari itu, silpa yang ada tidak boleh sekadar menjadi saldo, melainkan harus kembali ke masyarakat dalam bentuk program nyata.

Nasih berharap, pemerintah daerah dapat memanfaatkan kelebihan anggaran ini secara bijak. Sehingga, berbagai sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan ketahanan pangan bisa makin diperkuat.

"DPRD berkomitmen tetap mengawal setiap kebijakan agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Sidoarjo," pungkasnya. (*)

Akan Terjunkan 61 Cabor, KONI Bidik Runner-up di Porprov

KOTA-Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sidoarjo menargetkan capaian tinggi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025 yang akan digelar di Kota Malang. Ketua KONI Sidoarjo, Imam Mukri Afandi, optimistis Sidoarjo mampu meraih 800 poin dan mempertahankan posisi sebagai runner-up.

"Pada Porprov 2023, kita meraih 600 poin. Tahun ini, target kami naik menjadi 800 poin. Hal ini sudah kami konsolidasikan bersama Bidang Prestasi," ujarnya.

Terkait bonus bagi atlet, Imam menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Namun, ia memastikan akan ada peningkatan nilai bonus dibandingkan sebelumnya.

"Soal bonus memang ranah Disporapar. Tapi kami pastikan ada kenaikan, karena kami ingin menjamin kesejahteraan para atlet," tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya tengah menunggu pencairan dana hibah dari Pemkab Sidoarjo senilai Rp 15 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan atlet dan pelaksanaan program kerja KONI.

"Dana itu penting untuk mendukung



BERPELUANG EMAS LAGI: Tim sepak bola putra Sidoarjo berhasil menjadi juara di ajang Porprov 2023.

kung pemusatan latihan, penyediaan peralatan, hingga logistik pendukung," jelasnya.

Pada Porprov mendatang, KONI Sidoarjo akan menurunkan atlet dari 61 cabang olahraga (cabor), meningkat dibanding keikutsertaan sebelumnya.

Namun, masih ada tujuh cabor yang belum bisa ikut serta karena kendala teknis.

"Saya ingin semua elemen olahraga di Sidoarjo bersatu dan solid," ujarnya.

KONI juga akan memperkuat

komunikasi dengan para pengurus cabor untuk mencegah perpindahan atlet ke daerah lain.

"Kami akan terus menjalin komunikasi intensif agar atlet tetap bertahan dan berprestasi untuk Sidoarjo, pungkasnya. (sai/vga)



Bupati Tunggu Manajemen

KOTA-Polemik penyewaan Stadion Gelora Delta Sidoarjo (GDS) masih belum menemukan titik terang. Kurangnya komunikasi antara Pemkab Sidoarjo dan manajemen Deltras membuat permasalahan ini terus menggantung.

Usai bertemu dengan kelompok supporter Deltamania, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menaikkan tarif sewa stadion. Ia menjelaskan, tarif sewa yang berlaku saat ini merupakan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya dan baru akan diberlakukan pada 2025.

"Hingga saat ini belum ada komunikasi



MENGGANTUNG: Foto bersama antara Bupati Sidoarjo Subandi dan kelompok supporter Deltras Sidoarjo, Deltamania

kes dan manajemen Deltras kepada saya. Padahal, sebagai kepala daerah, saya berkomitmen agar Deltras tetap bermain di Kota Delta," ujarnya.

Subandi juga menyampaikan bahwa dirinya merupakan pencinta sepak bola dan ingin Deltras terus eksis. Namun, ia menegaskan bahwa

Pemkab masih menunggu inisiatif dari pihak manajemen Deltras untuk datang dan membicarakan persoalan tersebut secara langsung.

Ia menambahkan, Stadion GDS kini telah berstandar internasional dan telah diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. "Presiden sebelumnya sempat meninjau stadion lain, namun akhirnya memilih GDS untuk peresmian," ungkapnya.

Menanggapi keluhan terkait tingginya tarif sewa, Subandi menawarkan solusi berupa sistem penjualan tiket yang dibagi per wilayah. Selain itu, organisasi perangkat daerah (OPD) juga akan dilibatkan untuk membantu meringankan beban biaya sewa stadion.

Kesibukannya sebagai bupati membuatnya tidak bisa terus menunggu. Oleh karena itu, ia berharap agar manajemen Deltras segera datang ke Pendapa. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

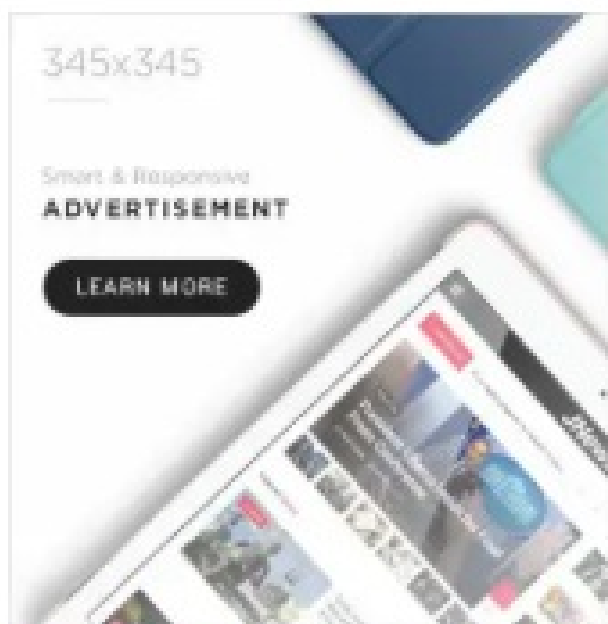
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jamaah Tertua Berusia 87 Tahun, Bupati Lepas Keberangkatan CJH Kloter 20 Asal Sidoarjo



Republikjatim.com

HoBa, 07 Mei 2025 17:29 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi melepas keberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Sidoarjo untuk kloter 20. Pelepasan dilakukan di Pendopo Delta Wibawa menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya, sebelum CJH diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekkah, Selasa (06/05/2025) petang.

Sebanyak 378 CJH dan 4 pendamping yang tergabung dalam kloter 20 diberangkatkan. Mereka seluruhnya merupakan warga Kabupaten Sidoarjo. Dari jumlah itu, jamaah tertua adalah seorang warga berusia 87 tahun dan CJH termuda berusia 21 tahun.



REPUBLICJATIM
Cepat, Akurat, Tajam, Faktual dan Terpercaya

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Bupati Sidoarjo, Subandi menyampaikan doa dan harapan kepada para CJH agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji.

"Saya mewakili Pemkab Sidoarjo mengucapkan selamat jalan kepada seluruh CJH. Jagalah kesehatan dengan baik selama pelaksanaan ibadah haji. Jangan lupa, titip doa untuk Kabupaten Sidoarjo agar menjadi baldatun thoyyibatun warobbun ghofur," ujar Subandi.



Rabu, 07 Mei 2025 13:52 WIB

Langgar Izin Tinggal, Seorang Warga Malaysia Dideportasi Petugas Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya Lewat Juanda

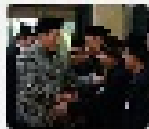
Kloter 20 dilepas setelah melalui persiapan administratif serta pembekalan kesehatan serta manasik yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pelepasan turut dihadiri Sekretaris Daerah, perwakilan Kemenag, Kejaksaan Tinggi Negeri hingga dari unsur TNI dan POLRI. Selain itu juga dihadiri keluarga besar CJH. Seluruh rangkaian acara berjalan khidmat dan penuh haru.



Rabu, 07 Mei 2023, 00:58 WIB

Pengurus BWI Sidoarjo Dilantik, Bupati Berharap Mampu Gerak Aktif Kembangkan Potensi Waqaf di Kota Delta



"Semoga seluruh CJH asal Kabupaten Sidoarjo dapat menunaikan ibadah dengan sempurna dan kembali ke tanah air dengan gelar haji yang mabrur," pungkasnya. Ary/Waw



Pemkab Sidoarjo Akan Gelar Lomba Konten Medsos OPD

May 7, 2025 - 8 Views





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Progres jatim.com Sidoarjo– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berencana menggelar lomba konten media sosial (medsos) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Para admin medsos di setiap OPD diminta untuk membuat konten yang semenarik mungkin. Selain menarik, konten tersebut juga harus mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Rencana tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, saat menutup kegiatan Bootcamp Media Sosial yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo di Aula BKD Sidoarjo, Rabu (7/5). Program pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh admin medsos OPD serta admin medsos dari instansi vertikal, dan berlangsung selama tiga hari, mulai 5 hingga 7 Mei 2025.

Sekda Fenny menyampaikan bahwa peran media sosial sangat penting dalam membangun citra positif pemerintah. Menurutnya, medsos menjadi salah satu cara efektif untuk menyampaikan capaian dan kinerja pembangunan, sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Sidoarjo.

“Media sosial itu sangat penting. Pesan-pesan dari pemerintah bisa diterima masyarakat dengan baik melalui konten yang menarik dan mudah dipahami,” ujarnya.

Fenny mengapresiasi pelaksanaan pelatihan ini dan menyatakan akan memantau perubahan kualitas konten medsos OPD setelah pelatihan. Ke depan, konten-konten tersebut akan dilombakan, dengan penilaian berdasarkan sejauh mana konten tersebut berdampak terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

“Substansi yang saat ini menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo adalah jihad rawat jalan, jihad rawat kali, jihad rawat sekolah rusak, dan jihad rawat taman. Itu semua menyentuh langsung pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo,” jelasnya.

Ia juga berharap terjalin sinergi dan kolaborasi antaradmin medsos OPD dalam merespons keluhan masyarakat di medsos, seperti dengan turut menjawab komentar di akun OPD lain. Menurutnya, langkah tersebut merupakan respons cepat yang sangat dibutuhkan masyarakat pengguna medsos saat ini.

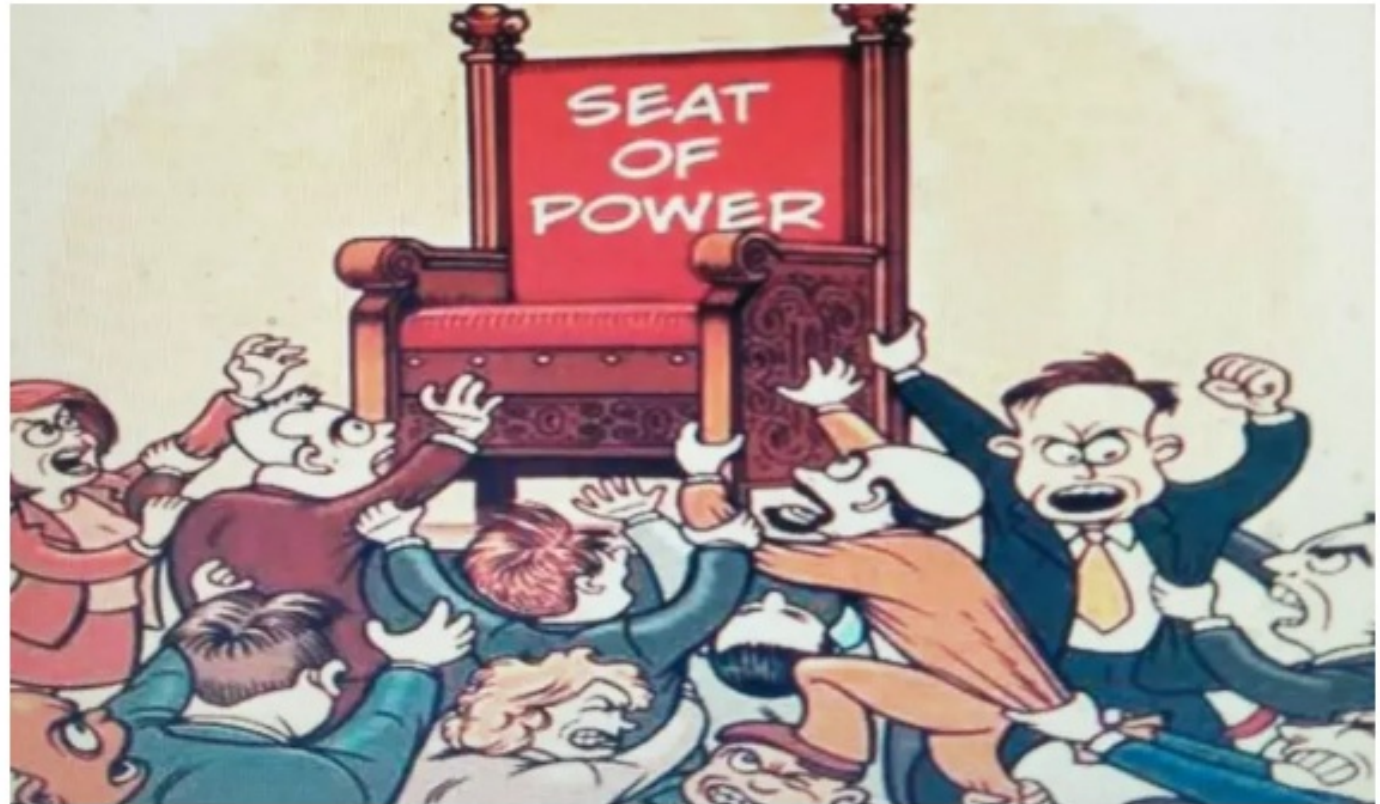
“Panjenengan bisa bersinergi dan berkolaborasi. Kalau ada komentar pengaduan, bantu komentar, bantu respons, apalagi kalau memiliki data,” tuturnya. (GUS)



BAK BOLA PANAS: 'Pertarungan' Pokir Jadi Trending Topik Publik Sidoarjo

"Coming Soon. Drama Action...saling adu kekuatan politik di Sidoarjo.. siapa yang akan terbanting?"komentar Haryadi, anggota group publik WA yang dikenal sebagai aktivis Sidoarjo .

🕒 May 7, 2025 - 22:47



ilustrasi

NUSADAILY.COM – SIDOARJO: Bak bola panas yang terus menggelinding. Sidang paripurna LKPj Bupati Sidoarjo yang tidak dihadiri sebagian besar anggota DPRD Sidoarjo yang disebut-sebut sebagai implementasi sikap politik atas kekecewaan terhadap Bupati Subandi, menjadi trending topik perbincangan publik.

Setidaknya tersirat di beberapa aplikasi media sosial group publik WhatsApp (WA). Seperti di group WA Suara Masyarakat Sidoarjo (SMS) maupun di Ruang Publik Sidoarjo (RPS) dan Pojok Sidoarjo yang anggotanya ratusan pengguna WA dari berbagai profesi,-- sebagian besar merupakan masyarakat Sidoarjo.

Pendapat pro kontra pun sempat mewarnai dalam diskusi di aplikasi group medsos yang beranggotakan ratusan pengguna WA tersebut. Anggotanya mulai dari kalangan tokoh masyarakat, pengusaha, aktivis, pengacara hingga praktisi media dan politikus maupun birokrat.

Dengan segala analisa kritisnya,--terlepas berangkat dari pemikiran subyektif maupun obyektif atau suka tidak suka,-- mereka mencoba membedah fenomena sikap sebagian anggota DPRD yang 'memboikot' sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas LKPj Bupati Tahun Anggaran 2024.

Lalu apakah sikap politik sebagian besar legislator ini sebuah sinyal terjadinya ketidakharmonisan hubungan legislatif dan eksekutif? Benarkah penyebabnya karena statemen Bupati Subandi yang menyebut DPRD hanya menghambur-hamburkan uang. Selain itu, benarkah sikap Bupati Subandi tidak menghargai lembaga legislatif, dan menganggap DPRD tidak begitu penting?

Memanasnya suhu politik meyangkut dua lembaga pemerintah ini disinyalir terkait pula dengan program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sidoarjo, yang merupakan representasi partisipasi masyarakat dalam kelangsungan pembangunan di Sidoarjo. Dari 700 usulan pihak legislatif, hanya sekitar 200 yang diakomodir eksekutif dengan dalih efisiensi dan akuntabel.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pun dalam pelaksanaannya (purchasing), apakah melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) atau diwakelola masih belum memenuhi persepsi sama antara kedua lembaga pemerintah tersebut. Ironisnya, pihak eksekutif sendiri menyusun program 4.000 paket yang di PL pada Tahun Anggaran 2025.

Kondisi inilah yang disebut-sebut membuat pihak legislatif meradang. Apalagi alasannya dikaitkan dengan visi dan misi Bupati Sidoarjo, sehingga usulan legislatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui Pokir telah dikepras besar-besaran. Meski dari 700 yang diusulkan itu nilainya tidak lebih dari 5 % dari anggaran yang dibelanjakan eksekutif. Namun yang diakomodir hanya sekitar 200 usulan.

Padahal merujuk Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Pokir merupakan hak DPRD, yang disusun dari hasil reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat. Sehingga wajib menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Pokir juga diatur sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Yang juga disesalkan bila pengeprasan Pokir dilakukan eksekutif karena tidak sesuai dengan visi dan misi bupati. Mengingat para anggota dewan juga mempunyai janji politik terhadap masyarakat, sebagai konstituennya. Sehingga bila Pokir yang diusulkan pihak legislatif itu, dikepras besar-besarnya tentunya bisa mendegradasi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Nah dari berbagai sudut pandang inilah melahirkan anggapan bahwa eksekutif telah bertindak tidak adil, sewenang wenang terhadap legislatif, sehingga memicu memanasnya suhu politik di Sidoarjo.

Di tengah serunya diskusi, Haryadi, anggota WA group SMS dikenal sebagai aktivis senior di Sidoarjo sempat memposting dengan gaya plesetan; *"Saat ini Dewan tidak habis berpikir kok eksekutif tdk berpikir...Saya sebagai rakyat berpikir akhirnya....Sidoarjo tdk baik-baik saja gegara Pokir."* Lalu dia pun menambahkan: *"Coming Soon. Drama Action..saling adu kekuatan politik di Sidoarjo.. siapa yang akan terbanting?"*.

Ketika dikonfirmasi soal suhu politik di Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo menegaskan Sidoarjo dalam keadaan baik-baik saja. Dia menyebutkan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif selama ini telah terjalin harmonis.

"Jangan gampang menyimpulkan. Hanya karena sidang paripurna kemarin yang tidak dihadiri sebagian besar anggota, lalu disimpulkan ada persoalan. Saya yang ada di dalam dewan) merasa tidak ada masalah. Dan Sidoarjo baik-baik saja," katanya, pada Rabu (7/5/2025) malam.

Justru, lanjut Gus Dham, pihaknya menyesalkan ketidakhadiran sebagian besar teman sejawat pada acara sidang paripurna. *"Kami ini berkewajiban menjaga marwah lembaga DPRD. Sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban harus balance dengan mengedepankan kepentingan masyarakat,"* ujarnya.

Pun demikian dalam persoalan Pokir, Gus Dham menilai tidak ada permasalahan berarti, meski dari 700 usulan telah 'dikebiri' menjadi sekitar 200 oleh pihak eksekutif. Seperti dirinya yang mengusulkan Pokir senilai Rp 1,3 miliar, yang melekat di Dinas Pertanian,--bahkan saat ini pelaksanaannya mulai berjalan.

"Jadi tidak persoalan. Kalaupun ada usulan Pokir yang belum diakomodir, mungkin masih perlu disinkronisasikan atau dikonsolidasikan lagi," ujarnya. *"Jadi tidak ada masalah di DPRD maupun di eksekutif,"* tambah Gus Dham menegaskan kembali. (*cak ful)

